

PENGUATAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI (PSE) SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Petrus Ans Gregorius Taek¹, Darsono Wisadirana² & Wawan Sobari³

¹²³Magister Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya Malang
Email: Petrusgregorius87@gmail.com, darsono_wisa@ub.ac.id,
& wawansobari@gmail.com

Abstract

This qualitative case study aims to assess the contribution of the PSE Commission in alleviating poverty and to analyze PSE institutional strengthening in the success of poverty alleviation priority programs. Institutional strengthening is the key to the sustainability and success of poverty alleviation programs. However, there are studies that show that institutional strengthening through legal aspects, Provincial Drinking Wages and public policies have been effective enough to alleviate poverty. Of the many findings that exist, researchers discovered new things, namely through institutional strengthening in aspects; Structure, HR, Finance, Organizational Funding and Assets, Monitoring and Evaluation, Legality, Data and Information and Collaborative Networks can determine the success of the institution in alleviating poverty and the sustainability of poverty alleviation priority programs. The pattern of the empowerment approach carried out by the government is seen as less touching on the problems of the poor because it is project oriented, while the one carried out by the Catholic Church is oriented towards religious values.

Keywords: *Strengthening PSE Institutions, Poverty Alleviation Priority Programs.*

A. PENDAHULUAN

Penguatan kelembagaan adalah salah satu unsur keberhasilan sebuah organisasi atau lembaga dalam menyukseskan visi dan misinya. Ideologi organisasi akan menjadi semangat bagi para anggotanya jika banyak keberhasilan yang dicapai dalam setiap program yang dirancang. Penelitian ini menganalisis penguatan kelembagaan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang kemanusiaan khususnya mereka yang lemah, miskin dan papah, tidak berdaya dan tersingkir dari perhatian dunia. Lembaga kemanusiaan dalam Gereja Katolik ini telah banyak melaksanakan misi kemanusiaan melalui program-program pemberdayaan masyarakat, perlindungan HAM dan darurat bencana.

Penguatan kelembagaan bertujuan: 1) agar umat/masyarakat sasaran penerima manfaat program dapat keluar dari permasalahan kemiskinan setelah diberdayaakan karena pendampingan lembaga PSE yang meng-umat. 2) Lembaga donor yang bermitra dengan lembaga PSE semakin percaya terhadap kinerja dan pelayanan Komisi PSE dalam upaya mengentaskan kemiskinan. 3) agar keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan dapat terus berjalan setelah selesai pelaksanaan program.

Gereja Katolik melalui Komisi PSE (KPSE) mulai dari tingkat Konferensi Wali Gereja Indonesia, tingkat Keuskupan hingga tingkat Gereja Paroki (Sosek) melihat persoalan kemiskinan sebagai ketidakadilan di balik tata kelola bidang ekonomi yang tidak adil karena posisi tawar masyarakat lokal yang lemah melawan ideologi kapital yang kuat. Gereja Katolik hadir untuk membela hak-hak hidup masyarakat lokal agar mereka tidak semakin terpinggirkan. Komisi PSE Keuskupan Atambua (KA) telah bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan internasional yang bermisi juga bagi upaya pencegahan masalah sosial/kemanusiaan.

Wilayah fokus studi penelitian ini hanya pada salah satu Gereja paroki dalam wilayah KA yaitu Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno. Alasan pemilihan lokasi ini karena banyak terdapat umat prasejahtera yang sangat mengkhawatirkan sehingga perlu sekali dilakukan pemberdayaan agar mereka dapat keluar dari perangkap kemiskinan terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Karakteristik kemiskinan yang dialami umat ini yakni kemiskinan struktural yakni akibat akses yang terbatas pada sektor pendidikan, lapangan pekerjaan, kepemilikan lahan (tanah) untuk usaha, politik dan SDM yang rendah. Ciri khas kemiskinan ini sangat memprihatinkan karena umat prasejahtera kurang mampu mendapatkan akses-akses diatas.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Belu telah banyak menganggarkan dana dalam bentuk program bantuan bagi umat di wilayah Gereja ini seperti raskin, PKH, PNPM mandiri, KUR, bantuan pendidikan dan lain sebagainya tetapi masih saja banyak terdapat warga miskin. Pola pendampingan

pemerintah yang bernuasa “proyek” tidak mampu secara efektif mengentaskan masalah kemiskinan. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno melalui Seksi Sosial Ekonomi dapat berhasil sedikit menekan angka umat prasejahtera di wilayah pastoralnya.

Program-program prioritas pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Gereja ini yakni Tanggap Darurat, Pertanian Lahan Kering, Kesehatan, Air Bersih dan Sanitasi, Advokasi dan Pemberdayaan serta Program Peternakan Babi. Melalui penguatan kelembagaan PSE program-program tersebut telah berhasil dalam menekan angka kemiskinan di wilayah pastoralnya. Perlu sekali dilakukan penelitian untuk mengetahui penguatan kelembagaan PSE dalam menyukseskan program prioritas pengentasan kemiskinan dan juga untuk mengetahui kontribusi KPSE dalam mengentaskan masalah kemiskinan di wilayah Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno.

Sebelumnya telah ada studi yang menemukan bahwa penguatan kelembagaan cukup diukur dari aspek hukum, peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dan kerja sama dengan pihak ketiga, dapat efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan oleh Lianto, dkk pada program PNPM mandiri di Kecamatan Balangpagong, Kabupaten Gresik (Lianto, 2015).

Kemudian studi yang dilakukan oleh Lady Vironica Janiari dan Aris Soelistyo tentang peran kelembagaan (pemerintah dan perbankan) serta pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) sangat berperan kuat bagi peningkatan kesejahteraan bagi pengentasan kemiskinan (Janiar, 2017).

Studi lain dilakukan oleh Kristiyanto tentang Penguatan Kebijakan Publik sebagai Usaha Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Industri Mikro Olahraga di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penguatan kebijakan publik yang jelas, dapat memberikan kesempatan bagi industri olahraga dalam mengembangkan usaha bisnis olahraga sehingga dapat juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan (Kristiyanto, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Subekti, dkk di di Kabupaten Jember menunjukkan penguatan kelompok tani yaitu dengan meningkatkan hubungan sinergis antara kelompok tani dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dapat mendukung penguatan kelompok tani adalah petani, gapoktan, Departemen Pertanian, Lembaga Penelitian, Laboratorium hama dan penyakit, PPAH, lembaga keuangan, HIPPA, pedagang, fasilitas produksi kios dan universitas. Dengan penguatan itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani (Sri Subekti, 2015).

Studi yang dilakukan oleh Swastika (2016) menemukan bahwa penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain; (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuh-kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha tani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota (Swastika, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Supriono, dkk. di Desa Tambak Ukir-Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, menemukan strategi memperkuat kelompok tani adalah dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Artinya bahwa potensi keunggulan yang dimiliki berupa faktor-faktor kekuatan internal yang ada dapat dikelola menjadi kekuatan pendorong guna meraih peluang-peluang serta sekaligus meminimalkan pengaruh negatif dari ancaman eksternal dapat berdampak pada penghasilan petani (Supriono, 2013).

Dari sekian banyak temuan yang ada, peneliti menemukan hal baru, bahwa melalui Penguatan kelembagaan pada aspek; Struktur, SDM, Keuangan, Pendanaan Dan Asset Organisasi, Monitoring dan Evaluasi, Legalitas, Data dan Informasi dan Jaringan kerja sama dapat menentukan keberhasilan lembaga PSE dalam mengentaskan kemiskinan dan keberlanjutan program prioritas

pengentasan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran penerima manfaat program.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pelaksanaan penelitian ini pada awal Desember 2018 sampai akhir Januari 2019. Lokasi pelaksanaan penelitian ini di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno-Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu-NTT. Teknik penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yakni dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Fokus penelitian pada penguatan kelembagaan PSE dan program-program prioritas pengentasan kemiskinan.

Cara memperoleh sumber data dengan mencari dan menentukan informan serta foto-foto kegiatan program prioritas pengentasan kemiskinan. Teknik penentuan informan yaitu *purposive sampling*. Pengambilan informan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu informan yang dianggap memiliki pengaruh atau kekuasaan terhadap segala proses PSE-KA sehingga dapat memberikan informasi yang akurat. Informan yang dipilih ditentukan terlebih dahulu meliputi: Uskup Atambua, Para Staf pengelola/Pengurus PSE-KA, Pastor Paroki dan Pastor Pembantu Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno, Para Ketua Lingkungan, Kelompok Umat Basis (KUB), Orang Muda Katolik (OMK) dan umat Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno yang ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, rekaman arsip, wawancara mendalam, observasi langsung dan *focus group discussion* (FGD). Dokumentasi diambil dari dokumen-dokumen administratif, foto-foto, video kegiatan pemberdayaan, dan data-data program prioritas pengentasan kemiskinan PSE-KA. Rekaman arsip diambil dari rekaman layanan di sekretariat kantor PSE-KA, rekaman keorganisasian seperti bagan dan

anggaran, peta dan bagan karakteristik geografis dan data survei seperti rekaman data sensus. Wawancara mendalam dilakukan dengan mewawancarai para informan dan umat Gereja yang ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Observasi langsung dan FGD dilakukan dengan para Staf/Pengurus PSE-KA, Pastor Paroki dan Pastor Pembantu, para Ketua Lingkungan KUB, OMK dan umat.

Pengujian keabsahan data dengan metode: a) *Credibility* (derajat kepercayaan) diselesaikan dengan cara: Perpanjangan pengamatan, Peningkatan ketekunan dalam penelitian, Triangulasi (Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, Analisis kasus negative, Menggunakan bahan referensi, Mengadakan *member-cheek*), b) *Transferability* (derajat keteralihan), c) *Dependability* (derajat ketergantungan) dan d) *Confirmability* (derajat kepastian). Pengolahan data dilakukan dengan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian (*coding*), mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas untuk memudahkan tahap analisis (Raharjo, 2017).

Teknik analisis data adalah analisis deskriptif berupa uraian tentang penguatan PSE-KA dan penjelasan tentang program-program prioritas pengentasan kemiskinan. Langkah-langkah analisis data yang digunakan adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Kelembagaan PSE dalam Menyukseskan Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan.

Analisis situasi untuk Penguatan Kelembagaan PSE/Seksi Sosial Gereja Paroki (SSP/Sosek) St. Petrus Tukuneno bersifat deskriptif. Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing untuk penguatan

kelembagaan PSE-KA sehingga visi dan misi kelembagaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat tercapai dan kepercayaan lembaga pendonor semakin tinggi.

a. Analisis Internal

1). Aspek Struktur

Dalam aspek ini ada kekuatan-kekuatan dalam struktur organisasi seperti Staff bekerja sesuai pembagian tugas, Struktur ada sesuai dengan pembagian kerja, Kepengurusan aktif dan management baik dalam arti ada keterbukaan. Sementara kekurangan yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan penguatannya seperti belum ada *JOB-Desk*, belum ada staf Monev karena masih merespons proyek dari pada lembaga, belum ada pertemuan rutin antara pendiri, pengurus dan staf untuk melihat capaian lembaga selama setahun.

2). Aspek SDM

Kekuatan dalam aspek ini seperti Staf PPSE memiliki SDM dan pengalaman kerja yang baik, semangat belajar dan motivasi yang tinggi, Jiwa pengabdian pada komunitas (Tinggal di Desa), Pengalaman bekerja di wilayah konflik, pelayanan yang melibatkan, mencerdaskan dan menghidupkan, PPSE bekerja dengan hati untuk meningkatkan pelayanan dan adanya dukungan dari para donatur. Sementara kelemahan yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan penguatannya seperti masih ada staf yang belum maksimal dalam menyelesaikan tugas, belum ada peningkatan kapasitas yang teratur/sistimatis, pendampingan dengan kaum marginal sangat singkat bergantung pada Program.

3). Aspek Keuangan, Pendanaan Dan Asset Organisasi

Dalam aspek ini ada kekuatan-kekuatan yang dimiliki yakni memiliki sumber pendanaan dari program yang jelas, manajemen keuangan sesuai kebutuhan mitra, punya asset organisasi, laporan keuangan tertulis dan tersimpan dengan rapi, gaji staff sesuai

standar UMR Provinsi NTT, hasil audit baik, staff keuangan trampil dalam pengelolaan keuangan, Dana yang dikucurkan LSM CRS selama 3 tahun (2016-2019) sebesar \$ 605,435. Sementara kelemahan yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan penguatannya seperti belum punya dana sendiri (Private sector), pendanaan tergantung donor, tidak punya *core funding* (Pendanaan Inti) dan belum punya *fund raising* (Penggalangan dana).

4). Monitoring dan Evaluasi

Dalam aspek ini ada kekuatan-kekuatan yang dimiliki yakni melakukan komponen evaluasi dan monitoring secara teratur, Rapat bulanan yang dibuktikan dengan agenda dan notulensi, monitoring dan evaluasi dibuat berdasarkan data lapangan. Sementara kelemahan yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan penguatannya seperti belum maksimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi dan belum punya staf monitoring dan evaluasi tetap.

5). Aspek Legalitas

Dalam aspek ini ada kekuatan-kekuatan yang dimiliki yakni sudah ada Akta Notaris dan memiliki NPWP. No NPWP PPSE-KA: 01.414.9728.922000. Namun, kelemahan yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan penguatannya seperti akta perlu diperbarui, belum terdaftar di KEMENKUMHAM RI, belum tercatat di KESBANGPOL Prov. NTT dan Kabupaten Belu.

6). Data dan Informasi

Dalam aspek ini, kekuatan-kekuatan yang dimiliki yakni mudah memperoleh data dan informasi dan punya akses informasi terhadap layanan perempuan dan anak dan masalah sosial lainnya. Namun, kelemahan yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan penguatannya yaitu data-data belum tersedia secara detail.

7). Jaringan

Dalam aspek ini ada kekuatan-kekuatan yang dimiliki yakni PPSE membangun jejaringan dengan LSM lokal, kepolisian, DPRD Kabupaten, PEMDA Belu, NGO International, Jaringan Lintas Agama, Pers dan unsur terkait lainnya dan PPSE adalah Lembaga Gereja yang terpercaya. Namun, kelemahan yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan penguatannya yaitu belum ada jadwal pertemuan rutin.

b. Analisis Eksternal

Aspek ini dianalisa berdasarkan isu-isu yang berkembang dan ancaman-ancaman budaya dan lingkungan sosial yang membuat masyarakat sulit berkembang sehingga memberi kesempatan/ peluang bagi PSE-KA untuk menyusun program-program yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

1). Aspek Masyarakat

Kesempatan/ peluang yang berkembang di masyarakat adalah masyarakat membutuhkan pendampingan yang intensif, masyarakat siap menerima perubahan, adanya kelompok- kelompok pemberdayaan, kerjasama baik dengan unsur lintas agama, masyarakat mulai sadar untuk kerja kelompok dan masyarakat ingin belajar hal baru. Namun ada ancaman yang berkembang yaitu periode program yang pendek; Adanya pola pikir yang salah dari masyarakat tentang program; Kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih rendah; Masih ada masyarakat yang bekerja secara individu; Kebijakan atau keputusan dalam musyawarah masih didominasi oleh kaum laki-laki; dan daerah-daerah rawan bencana dan terpencil jarang dan atau belum dijangkau oleh LSM Lokal dan LSM International.

2). Pemerintah

Kesempatan/pejuang yang berkembang di masyarakat adalah adanya rekomendasi dari Pemerintah mulai dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat marginal; Adanya dukungan dari DPRD Belu; Ada kepercayaan dari Pemerintah terhadap PPSE dalam pendampingan kepada masyarakat dan Hubungan kerja yang baik dengan SKPD. Namun ada ancaman yang berkembang yaitu tidak ada kebijakan yang memperkuat Program; Hubungan LSM lokal dan pemerintah masih rendah; Belum ada dukungan teknis dari SKPD terhadap Program yang di jalankan; Alokasi anggaran masih kecil untuk *Pro Poor* dan *Responsif Gender*.

3). Dana & Donor

Kesempatan/pejuang yang berkembang di masyarakat adalah adanya lembaga donor. Namun ada ancaman yang berkembang yaitu belum mempunyai dana tetap; Minimnya lembaga Donor yang membuka akses ke Kab. Belu; Intervensi LSM ke Kabupaten Belu masih kurang.

c. Tujuan Strategi Dan Indikator Perubahan

1). Isu Strategi Internal

Isu strategis ini menjadi arah dasar bagi Komisi PSE dan kepanitiannya serta seksi Sosek (SSP) di seluruh paroki untuk semakin memperkuat kelembagaannya agar semakin terpercaya dan semakin loyal dalam pelayanan kepada masyarakat marginal. Isu itu seperti a) Meningkatkan kemandirian lembaga melalui perbaikan kemampuan desain Program/design Project dan pengelolaan lembaga (Keuangan, manajemen organisasi, pendanaan khusus (funrecing)), b) Meningkatkan kapasitas advokasi berbasis pengorganisaian kelompok Marginal dan c) Merevisi SOP yang sudah ada Program, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi.

2). Isu Strategi Eksternal

Sedangkan isu eksternal yang berkembang luas di masyarakat adalah landasan yang digunakan Komisi PSE dan kepanitiannya serta seksi Sosek (SSP) di seluruh paroki untuk dapat menyusun rencana program pendampingan dan pemberdayaan yang sesuai situasi dan kebutuhan masyarakat marginal. Isu itu seperti: a) Meningkatkan pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat Marginal untuk mendorong perubahan, b) Mendorong perubahan kebijakan untuk Pro masyarakat marginal dan gender, c) Mendorong kerjasama jaringan untuk melakukan advokasi terhadap hak-hak kaum marginal, d) Mendorong kerja sama dalam semangat persekutuan untuk membangun perdamaian dan mengurangi konflik dan d) Meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat yang mengalami kekerasan dan terkena bencana.

Beberapa isu yang disinyalir membuat masyarakat marginal semakin terpinggirkan telah diidentifikasi oleh Komisi PSE dan kepanitiannya serta seksi Sosek (SSP) di seluruh paroki sehingga dapat digunakan untuk menyusun program pendampingan dan pemberdayaan yang tepat sasaran sehingga dapat menepis atau dapat melindungi masyarakat marginal dari perlakuan yang tidak memihak pada kesejahteraan mereka. Tujuan-tujuan dan indikator-indikator perubahan yang ditetapkan diharapkan dapat melindungi masyarakat miskin dari perlakuan yang tidak adil. Beberapa isu itu seperti terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1
Isu Strategis, Tujuan Dan Indikator Perubahan

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Perubahan
Kurangnya Pendampiran dan Rendahnya Pelayanan kepada Masyarakat Marginal.	Meningkatkan Kapasitas Kaum Marginal Baik Kualitas Maupun Kuantitas.	- Bertambahnya Lembaga Donor dengan Program Kerja Jangka Panjang. - Pendamping Lapangan Tinggal Bersama dengan Masyarakat di Desa (<i>Leave-In</i>).

Pola Hidup Masyarakat Dalam Mengolah Sistem Pertanian, Ekonomi, Sosial Budaya Masih Bersifat Tradisional.	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatannya untuk Kehidupan Ekonomi Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah Lapangan Dilaksanakan di Setiap Desa. - Pertemuan Reguler dengan Dinas Teknis dan DPRD. - Monitoring Bersama dengan Dinas Teknis dan DPRD. - Publikasi Media tentang Kegiatan Inovatif.
Pola Pendampingan Dari Setiap NGO Terhadap Kaum Marginal Masih Bersifat Karitatif.	Membangun Kesadaran Masyarakat Tentang Peran Serta Kehadiran NGO di Tingkat Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Sharing Program Bersama Antar NGO - Jadwal Diskusi Rutin Antar NGO - Pendampingan Masyarakat Secara Rutin.
Masih Ada Kesenjangan Dalam Tatanan Sosial Masyarakat.	Meningkatkan Rasa Solidaritas dan Cinta Damai Antara Anggota Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya Kelompok-Kelompok Tani di Tingkat Desa. - Kerja Gotong Royong Terbangun di Tingkat Desa.
Masyarakat di Daerah Rawan Bencana dan Sulit Dijangkau Kurang Mendapat Layanan Publik.	Mendekatkan Akses Infomasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat di Daerah Sulit dan Rawan Bencana.	<ul style="list-style-type: none"> - Penghijauan Bersama Daerah Rawan Bencana. - Terbentuknya Team Tanggap Darurat Tingkat Desa. - Ada Tanda Peringatan Dini di Tingkat Desa.

Sumber: Rencana Strategis Periode 2014-2019 Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE-KA)

2. Kontribusi KPSE dalam mengentaskan masalah kemiskinan di wilayah Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno.

Melalui program prioritas yang masih berjalan dengan dukungan dana dari Pemerintah RI (Kementerian Terkait), Pemerintah Kabupaten/Desa, LSM-LSM lokal dan internasional diharapkan dapat berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah kerja Keuskupan Atambua termasuk di wilayah Gereja St. Petrus Tukuneno.

Sedangkan Program-Program Strategis pengentasan kemiskinan yang dirancang adalah program-program yang dirancang sesuai dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat seperti:

- a. Program Tanggap darurat. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk mendukung rasa kepedulian atau perhatian terhadap mereka yang menjadi korban akibat dampak bencana alam dan kekerasan politik. Program ini didanai oleh LSM CRS dengan nama program yang khas yakni Program *Emergency Peace Bulding* dan *Emergency NEAR*. Output yang diharapkan dari program ini adalah masyarakat korban bencana alam dan kekerasan politik dapat terbantu/tertolong.
- b. Program Pertanian Lahan Kering. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan pertanian dan agar masyarakat mampu menerapkan teknologi konservasi tanah dan air. Program ini didanai oleh LSM CRS dengan nama program yang khas yakni Program *TaMPIk* (Tangguh Menghadapi Perubahan Iklim). Output yang diharapkan dari program ini adalah pengetahuan masyarakat petani tentang teknologi konservasi tanah dan air meningkat dan hasil produksi pertanian meningkat.
- c. Program Kesehatan. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan pola hidup bersih sehat masyarakat dan meningkatkan status gizi keluarga. Input atau realisasi dari program kesehatan yaitu Program Kesehatan dan PKP (*TAP/Transition Activity Programme*) kerja sama dengan CRS dan Program Kesehatan dan PKP(*DAP/ Development Activity Programme*) Kerja sama dengan CRS serta Program ProGAS (Program Gizi Anak Sekolah) kerja sama dengan PT. CARGILL dan WFP. Output yang diharapkan dari program ini adalah lingkungan dan halaman bersih dan tertata rapih, memiliki rumah layak huni dan angka kematian ibu dan anak menurun.
- d. Program Air Bersih dan Sanitasi. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk mendekatkan akses air bersih kepada masyarakat dan

untuk meningkatkan pola hidup bersih sehat. Program ini didanai oleh Oxfam GB-Kupang bekerja sama dengan PPSE. Nama program yaitu *Lifelihood*. Output yang diharapkan dari program ini adalah dapat membentuk kelompok masyarakat pengguna air bersih, tersedianya sarana perpipaan dan sumur sehat dan terbangunnya bak-bak penampungan air bersih serta memiliki MCK sehat.

- e. Program Advokasi dan Pemberdayaan. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah agar meningkatkan perubahan pola pikir masyarakat, menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, meningkatkan kemandirian hidup masyarakat, meningkatkan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyuarakan hak-hak kaum perempuan, anak dan kelompok marginal. Ada tiga jenis program yang dilaksanakan dalam program ini yaitu sebagai input dalam merealisasikan program ini. Ketiga jenis program itu adalah 1) Program *MAMPU* (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) kerja sama dengan Yayasan BaKTI-Makasar. 2) Program Pengentasan Kemiskinan melalui Migrasi Aman. Kerja sama dengan TIFA-Foundation. 3) Program Pendidikan Karakter dan *Life-Skill* kerja sama dengan ILO (*International Labour Organization*). Sementara itu, output yang diharapkan dari terealisasinya ketiga program di atas adalah agar masyarakat dapat meninggalkan pola pikir lama dengan menggunakan pola pikir baru termasuk dalam pemanfaatan teknologi yang inovatif, masyarakat terorganisir secara baik dalam kelompok kerja dan masyarakat mampu mengidentifikasi masalah-masalah sosial dan mampu menyuarakan kepada pengambil kebijakan dan publik.

Sementara itu program-program pelatihan/pemberdayaan bagi Orang Muda Katolik (OMK) Paroki Tukuneno yang telah dilakukan yaitu: Pelatihan Pembuatan Tahu, Tempe dan Susu Kedelei; Pelatihan Pengembangan Ternak Babi; Pengembangan Pertanian Lahan Kering; Pemberdayaan Kelompok Tenun

Ikut; Diklat Pembuatan Rosario; Diklat Pengelolaan Keuangan Dalam Rumah Tangga; Kelas Perdana Pelatihan Fotografi dan pelatihan desain grafis; Pelatihan jurnalistik, videografis dan pengembangan produk lokal berbasis pemberdayaan dan PIJAR (Persehatan pelajar).

Semua kegiatan program di atas sangat membantu anak muda dalam mengembangkan diri terutama dalam mengembangkan usaha bisnis pribadi karena pendampingan yang diberikan secara gratis ini syarat akan nilai-nilai Kristiani yakni cinta kasih kepada sesama. Dalam kesaksian OMK bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat lokal sangat menyentuh kebutuhan aktual masyarakat yaitu pemberdayaan untuk mengembangkan produk lokal yang dimiliki masyarakat. Produk lokal yang tidak bernilai ekonomis rendah dikembangkan menjadi lebih berharga dan martabat.

D. SIMPULAN

Strategi penguatan kelembagaan PSE yaitu dengan terus mem-*follow up* semua program prioritas pengentasan kemiskinan yang sudah dilaksanakan sehingga tidak mandek atau mubazir. Pengelolaan kelembagaan yang transparan, akuntabel, sumber daya yang kuat, struktur keorganisasian yang jelas, tata manajemen kelembagaan yang ketat dan disiplin, kinerja dan pelayanan yang royal dan mengumut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan lembaga pendonor untuk terus memberi sumbangan dana untuk keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan. Melalui program prioritas pengentasan kemiskinan dengan dukungan dana dari LSM lokal dan Internasional serta Pemerintah diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan bagi umat Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno.

DAFTAR PUSTAKA

Swastika, D. K. (2016). Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(4), 371-390.

- Janiar, L. V., & Soelistiyo, A. (2017). Analisis Penguatan Peran Kelembagaan Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu EKonomi JIE*, 1(3), 352-364.
- Kristiyanto, A. (2012). Penguatan Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Industri Mikro Olahraga. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2), 200-211.
- Lianto, L., Kanto, S., & Kholifah, S. (2015). Penguatan Kelembagaan Pengelola Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 18(4): 231-240.
- Subekti, S., Sudarko, S., & Sofia, S. (2016). Penguatan Kelompok Tani melalui Optimalisasi dan Sinergi Lingkungan Sosial. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 8(3), 50-56.
- Supriono, A., Bowo, C., Kosasih, A. S., & Herawati, T. (2013). Strategi penguatan kapasitas kelompok tani hutan rakyat di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10(3), 139-146.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rencana Strategis Periode 2014-2019 Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE -KA).